Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047
Volume 18 No. 1 | November 2023
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon

Government-Community Collaboration in Developing a Sustainable Marine Tourism Entrepreneurship Ecosystem in Negeri Hukurila, Ambon City

https://doi.org/10.30598/populis.18.1.50-64

Nindy Akapip[1*], Vrancisca Kissya[2]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
*nindyakapip84@gmail.com

Abstract

This article explores the collaboration between the government and the community in building a sustainable marine tourism entrepreneurship ecosystem in Negeri Hukurila, Ambon City. The study aims to examine the roles and synergy between these actors in fostering the development of a local economy based on environmentally friendly and sustainable marine tourism. The research employs a qualitative approach through field observations, in-depth interviews with key stakeholders, and document analysis related to tourism policies and local development. The findings indicate that effective collaboration between the government and the community is crucial for the successful development of the tourism entrepreneurship ecosystem. The government acts as a facilitator by implementing supportive policies, providing entrepreneurship training, and developing infrastructure, while the community actively participates as key actors in businesses leveraging local potential, such as beach tourism, ecotourism, and creative products derived from marine resources. Challenges include limited resources, community capacity constraints, and environmental degradation threats. However, intensive and trust-based collaboration has proven to enhance the competitiveness of the tourism ecosystem in the region. The novelty of this study lies in identifying an adaptive and participatory collaboration model that can serve as a reference for developing tourism entrepreneurship ecosystems in other coastal areas. The study recommends strengthening community capacity, diversifying businesses based on local potential, and applying sustainable tourism principles to preserve the environment and improve local community welfare.

Keywords: *Community, Entrepreneurship, Marine Tourism, Sustainable Development, Tourism Ecosystem*

Info Artikel
Naskah diterima: *04/01/2023*
Revisi terakhir: *05/02/2023*
Disetujui: *15/02/2023*

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan budaya lokal, terutama di daerah pesisir yang kaya akan keindahan alam dan warisan maritim. Negeri Hukurila di Kota Ambon memiliki potensi luar biasa dalam sektor ini, dengan panorama pantai yang eksotis, ekosistem bawah laut yang beragam, serta budaya pesisir yang khas (Lamerkabel et al., 2021). Namun, meskipun memiliki keunggulan komparatif, pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata secara berkelanjutan (Badaruddin et al., 2021; Lelloltery et al., 2020). Salah satu tantangan

utama yang dihadapi adalah kurangnya akses pelaku usaha lokal terhadap modal usaha yang memadai, yang berdampak pada keterbatasan dalam mengembangkan fasilitas dan layanan wisata (Pical & Lopulalan, 2022). Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen usaha dan strategi pemasaran membuat daya saing mereka relatif rendah dibandingkan dengan destinasi wisata bahari lain yang telah berkembang lebih maju. Kelemahan dalam tata kelola wisata juga tercermin dalam kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Nendissa et al., 2021; Rumkel et al., 2022).

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya skema kolaborasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis pemberdayaan ekonomi lokal (Botanri et al., 2021). Banyak program pengembangan yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga implementasinya sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya, meskipun ada berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum merata dirasakan oleh masyarakat Hukurila (Latuheru & Tiwery, 2022; Sunarimahingsih et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa pariwisata bahari tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kajian tentang peran kolaborasi dalam pengembangan pariwisata bahari telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks bagaimana sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekosistem wisata yang berkelanjutan. Astutik & Ramadhoan (2020) meneliti kerja sama antara pemerintah daerah dan komunitas lokal di kawasan pesisir Jawa Timur, menemukan bahwa koordinasi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahma, (2020), yang meneliti pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sektor ini.

Sementara itu, penelitian Amin (2019) dan Niode & Rahman (2022) lebih menyoroti strategi pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam sektor pariwisata bahari. Mereka menemukan bahwa keterbatasan akses terhadap pelatihan manajemen usaha menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Studi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat lokal. Suastika (2021) dan Sumiasih (2018) dalam penelitiannya di Bali menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan banyak program dukungan bagi usaha wisata, efektivitas program tersebut bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, studi oleh Asy'ari et al. (2021) membahas konsep ekowisata berbasis komunitas sebagai strategi pengelolaan pariwisata yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penelitian ini menegaskan

bahwa model pengelolaan wisata berbasis komunitas lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh analisis dari Wuryanto & Wibowo (2021) dan Yasintha (2020) yang menunjukkan bahwa desa wisata yang berhasil cenderung memiliki sistem tata kelola yang transparan dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangannya.

Dalam konteks strategi kebijakan, penelitian oleh Giampiccoli & Saayman (2018) mengungkapkan bahwa dukungan regulasi yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, Sawatsuk et al. (2018) menyoroti pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung pemasaran dan promosi wisata berbasis teknologi. Dalam era digital, platform media sosial dan teknologi informasi dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan eksposur destinasi wisata lokal serta memperkuat koneksi antara pelaku usaha wisata dengan pasar global (Lee & Jan, 2019; Yanes et al., 2019; Zielinski et al., 2020).

Namun, kajian yang secara khusus menyoroti pola kolaborasi yang adaptif dan partisipatif dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menggali bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menghadapi tantangan spesifik di wilayah pesisir seperti Hukurila, terutama dengan pendekatan berbasis ekosistem kewirausahaan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menggali secara mendalam bagaimana model kolaborasi adaptif dapat diterapkan di Negeri Hukurila untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam inovasi berbasis potensi lokal, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kondusif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pola kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Negeri Hukurila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis, terutama dalam merancang strategi pengembangan pariwisata bahari yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi sosial yang kompleks di antara para pemangku kepentingan. Seperti yang diungkapkan oleh (Creswell, 2017), metode kualitatif sangat efektif digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap realitas lokal secara lebih holistik dan kontekstual.

Negeri Hukurila, Kota Ambon, dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki potensi wisata bahari yang besar, namun tantangan dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan masih signifikan. Selain itu, Hukurila merupakan contoh representatif dari wilayah pesisir di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih berjuang untuk mewujudkan pembangunan berbasis pariwisata yang lestari. Dengan memilih Hukurila, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan solusi kontekstual bagi masyarakat setempat, tetapi juga menawarkan model kolaborasi yang dapat direplikasi di daerah pesisir lainnya di Indonesia.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi mereka terhadap tujuan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya luas, tetapi juga mendalam dalam menggambarkan dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata bahari di Negeri Hukurila. Dengan mempertimbangkan perspektif yang beragam, penelitian ini dapat menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Sebanyak 15 informan dilibatkan, yang terdiri dari tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah perwakilan pemerintah lokal (5 orang), yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait pariwisata. Keberadaan mereka sangat penting karena mereka memiliki wawasan mengenai kebijakan yang telah diterapkan, hambatan dalam implementasi, serta rencana pengembangan pariwisata ke depan. Perspektif mereka juga diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan dapat diadaptasi agar lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kelompok kedua adalah pelaku usaha lokal (6 orang), yang menjadi motor utama dalam ekosistem kewirausahaan berbasis pariwisata di Hukurila. Mereka berasal dari berbagai latar belakang usaha, seperti pemilik homestay, pemandu wisata, pengrajin produk berbasis sumber daya laut, serta pengelola destinasi wisata. Keberadaan mereka mencerminkan realitas ekonomi lokal serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pariwisata, baik dari segi akses modal, strategi pemasaran, maupun inovasi layanan. Wawasan yang mereka bagikan diharapkan dapat mengungkap sejauh mana keberlanjutan usaha wisata dapat didorong melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kelompok ketiga adalah tokoh masyarakat dan pemuda (4 orang), yang memiliki peran signifikan dalam membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Tokoh masyarakat sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan warga, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, pemuda memainkan peran sebagai agen perubahan yang dapat membawa inovasi dalam strategi pemasaran, digitalisasi pariwisata, serta penciptaan atraksi wisata baru yang lebih

menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendekatan purposif dalam pemilihan informan ini sejalan dengan panduan dari Patton (2015), yang menekankan pentingnya memilih individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti agar dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berlangsung selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan multimethod guna memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Kombinasi antara wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi digunakan untuk menggali berbagai aspek kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari di Negeri Hukurila. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih holistik, di mana informasi yang dikumpulkan dari satu metode dapat dikonfirmasi dan diperkaya melalui metode lainnya.

Metode utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yang dilakukan secara semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan respons informan. Wawancara difokuskan pada berbagai aspek, seperti peran pemerintah dalam mendukung kewirausahaan pariwisata, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta pola kolaborasi yang telah terbentuk di tingkat lokal. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 90 menit, dengan rekaman audio sebagai bentuk dokumentasi untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dapat dianalisis secara menyeluruh. Setelah itu, wawancara ditranskrip dan dianalisis guna mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam penelitian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengikuti berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti operasional destinasi wisata, pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal, serta pertemuan masyarakat yang membahas pengelolaan wisata bahari. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, peneliti dapat menangkap nuansa sosial yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti pola interaksi antar pemangku kepentingan, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah, serta respons masyarakat terhadap inisiatif pembangunan pariwisata.

Selain data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, penelitian ini juga didukung oleh metode dokumentasi yang berfokus pada pengumpulan data sekunder. Berbagai dokumen kebijakan, laporan program pemerintah, data statistik pariwisata, serta catatan historis mengenai perkembangan sektor pariwisata di Hukurila dianalisis untuk memperkuat temuan penelitian. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bahan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh

masyarakat (Jentoft & Olsen, 2019). Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan mengonfirmasi kembali temuan-temuan utama kepada beberapa informan kunci untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Melalui kombinasi metode dan teknik triangulasi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang akurat dan mendalam tentang pola kolaborasi dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari berkelanjutan di Negeri Hukurila. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap nuansa lokal yang unik serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pariwisata di wilayah pesisir lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pariwisata Bahari Negeri Hukurila

Negeri Hukurila, yang terletak di pesisir selatan Pulau Ambon, memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat menjanjikan dan kaya akan keindahan alam serta budaya lokal yang unik. Berbeda dari kawasan pariwisata massal yang berkembang pesat di wilayah lain, Hukurila tetap mempertahankan karakter alaminya yang asri dan belum banyak tersentuh oleh aktivitas wisata berskala besar. Pantai Hukurila, misalnya, dikenal karena keindahan garis pantainya yang dihiasi oleh batu-batu karang besar serta air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Pantai ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan, tetapi juga lokasi favorit untuk aktivitas snorkeling dan diving.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa salah satu daya tarik utama wisata bawah laut di Hukurila adalah keberadaan gua bawah laut yang unik, dihiasi terumbu karang beraneka warna serta biota laut seperti ikan pari, ikan badut, dan berbagai jenis moluska. Lokasi ini sering dikunjungi penyelam dari luar daerah yang tertarik dengan keindahan serta keunikan ekosistem bawah lautnya. Bapak YHN, salah satu pemandu wisata selam lokal, menjelaskan bahwa gua bawah laut di daerah tersebut menjadi daya tarik luar biasa bagi para penyelam. Menurutnya, para penyelam selalu terkesan karena tempat seperti ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Namun, ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi, yakni perlunya dukungan lebih untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut, terutama dari ancaman sampah plastik dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Selain daya tarik alam, Hukurila juga menawarkan kekayaan budaya lokal yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat Hukurila masih mempertahankan tradisi adat seperti “Pela Gandong”, sebuah ikatan persaudaraan antar desa, serta ritual laut yang dilakukan untuk menjaga harmoni dengan alam. Seni musik tradisional seperti musik totobuang (gong kecil khas Maluku) dan tarian cakalele dapat menjadi atraksi tambahan bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya yang otentik. Dalam wawancara dengan Ibu MTN, seorang pelaku usaha homestay, ia menjelaskan bahwa tamu-tamu yang datang sering diajak untuk melihat prosesi adat atau makan bersama dengan keluarga. Menurutnya, tamu-tamu selalu merasa seperti menjadi bagian dari keluarga

besar Hukurila. Ia menambahkan bahwa wisata di tempat tersebut lebih dari sekadar melihat pemandangan, melainkan tentang merasakan kehidupan lokal.

Selain pengalaman budaya, potensi ekonomi dari sektor pariwisata bahari juga cukup besar. Produk kreatif berbasis sumber daya laut, seperti kerajinan dari kulit kerang, abon ikan tuna, serta minyak kelapa murni, telah menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat. Produk-produk ini mulai menarik perhatian wisatawan yang mencari suvenir khas dari daerah pesisir.

Potensi besar yang dimiliki Hukurila sangat sejalan dengan konsep *Community-Based Tourism* (CBT), yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam konsep CBT, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga terlibat secara langsung dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi destinasi wisata mereka. Model CBT memiliki keunggulan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal mereka secara mandiri. Misalnya, pengelolaan homestay oleh penduduk lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut secara langsung berdampak pada keberlanjutan pariwisata di Hukurila. Namun, penerapan CBT juga menghadapi tantangan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa belum semua masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola pariwisata secara profesional. Pelatihan dan pendampingan masih sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang pelayanan wisata, manajemen usaha kecil, serta pemasaran digital.

Potensi wisata bahari di Hukurila juga tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pariwisata yang berkembang pesat tanpa perencanaan yang matang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol atau pencemaran pantai oleh sampah plastik. Dalam konteks ini, menjaga kelestarian lingkungan laut menjadi tantangan yang sangat penting bagi masyarakat Hukurila. Keindahan bawah laut, yang menjadi daya tarik utama wisatawan, akan cepat rusak jika tidak ada upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk melindungi ekosistem laut. Bapak ALX, salah satu tokoh masyarakat, menekankan pentingnya menjaga kelestarian laut. Ia menjelaskan bahwa jika laut rusak, wisatawan tidak akan datang lagi. Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga kebersihan pantai dan tidak merusak terumbu karang. Menurutnya, hal ini bukan hanya penting untuk sektor wisata, tetapi juga untuk masa depan mereka.

Pengembangan wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Hukurila dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang terintegrasi untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pertama, edukasi dan pelatihan lingkungan bagi masyarakat setempat serta pelaku usaha wisata menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi alam. Dengan pendekatan ini,

diharapkan para pelaku usaha wisata, baik itu pemilik penginapan, pemandu wisata, maupun pengusaha kuliner lokal, mampu mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas penyelam dan organisasi lingkungan untuk melakukan monitoring ekosistem laut sangat penting, mengingat laut di sekitar Hukurila memiliki potensi biodiversitas yang luar biasa. Dengan pemantauan yang rutin, ekosistem laut dapat terjaga, dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas wisata dapat diminimalisir.

Selanjutnya, pengembangan produk wisata berbasis ekowisata, seperti tur edukasi tentang pelestarian laut dan pengalaman budaya lokal, juga menjadi strategi yang efektif. Wisatawan yang datang tidak hanya akan menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya. Produk wisata seperti ini akan memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan dampak positif bagi konservasi alam. Melalui integrasi antara konsep *Community-Based Tourism* (CBT) dan teori pembangunan berkelanjutan, potensi pariwisata di Negeri Hukurila dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ini, masyarakat lokal berperan aktif dalam pengelolaan wisata, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan yang menjadi aset utama.

Model pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di Hukurila ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan pariwisata di daerah pesisir lainnya di Indonesia. Banyak daerah pesisir yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan konservasi lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan alam, Hukurila dapat menjadi contoh yang berhasil mengoptimalkan potensi wisata tanpa merusak ekosistem yang ada.

Dinamika Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Negeri Hukurila dalam pengembangan pariwisata bahari merupakan proses yang dinamis, penuh tantangan, tetapi juga menawarkan banyak peluang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, terutama melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara itu, masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam mengelola usaha-usaha kecil dan inisiatif berbasis sumber daya lokal yang terkait dengan pariwisata.

Dalam wawancara dengan Bapak RMT, seorang pejabat Dinas Pariwisata Kota Ambon, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas untuk mendukung pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa pihaknya mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melaksanakan program pelatihan keterampilan, bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta promosi wisata yang terus dilakukan untuk mendukung potensi yang ada di Hukurila. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program pelatihan bagi masyarakat, seperti

pelatihan manajemen homestay, pengolahan produk hasil laut, dan pelatihan pemandu wisata lokal. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu menyerap dan mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh.

Di sisi lain, masyarakat Hukurila menunjukkan inisiatif yang kuat dalam memanfaatkan potensi lokal mereka. Beberapa warga telah memulai usaha kecil di sektor pariwisata, seperti penyediaan jasa pemandu wisata, penyewaan peralatan snorkeling dan diving, serta pengolahan produk makanan khas berbasis hasil laut. Selain itu, kelompok ibu-ibu pengrajin di Hukurila memanfaatkan limbah kerang dan ikan untuk membuat kerajinan tangan dan camilan laut yang dijual kepada wisatawan.

Ibu SNT, seorang pengrajin lokal, mengungkapkan bahwa awalnya mereka hanya membuat kerajinan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah banyak wisatawan datang, mereka mulai menjualnya sebagai oleh-oleh. Ia juga menambahkan bahwa sekarang mereka mendapatkan bimbingan dari pemerintah mengenai cara untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka buat. Meskipun terdapat banyak inisiatif, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan masih menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pengetahuan tentang pemasaran digital, manajemen usaha, dan bahasa asing juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk menarik wisatawan dari luar negeri.

Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil adalah pembangunan pusat informasi wisata di Hukurila, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan kelompok pemuda setempat. Pusat informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat promosi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat lokal untuk belajar tentang ekowisata dan konservasi lingkungan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pusat informasi tersebut telah menjadi titik temu bagi wisatawan dan pelaku usaha lokal, memperkuat jaringan kerja sama di antara mereka.

Di sisi lain, kolaborasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur. Akses jalan menuju beberapa lokasi wisata di Hukurila masih dalam kondisi kurang memadai, sehingga menyulitkan wisatawan untuk mencapai tempat-tempat tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak ALX, seorang tokoh masyarakat, ia mengungkapkan bahwa mereka sudah sering meminta perbaikan jalan kepada pemerintah, terutama jalan menuju pantai-pantai wisata. Menurutnya, jika akses jalan diperbaiki, wisatawan akan lebih banyak datang, yang tentu saja akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar aktor, baik di tingkat pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga efektivitasnya menjadi kurang optimal.

Dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Hukurila dapat dianalisis melalui konsep *Collaborative Governance*, yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor-aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan bersama

serta pengelolaan sumber daya. Dalam model ini, kolaborasi yang ideal harus bersifat adaptif dan partisipatif, di mana setiap aktor memiliki peran yang jelas, transparan, serta saling melengkapi. Model kolaborasi adaptif-partisipatif sangat relevan dalam konteks Hukurila, karena pengembangan pariwisata bahari membutuhkan respons yang fleksibel terhadap perubahan kondisi lingkungan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan dialog, negosiasi, serta pembagian peran yang seimbang antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Misalnya, dalam pengelolaan kawasan wisata bahari, masyarakat berperan langsung dalam menjaga kebersihan pantai dan melestarikan ekosistem terumbu karang, sementara pemerintah mendukung dari sisi kebijakan dan bantuan teknis. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh komunitas.

Namun, keberhasilan model ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak serta evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan. Dengan mekanisme kerja sama yang efektif, potensi pariwisata bahari di Hukurila dapat berkembang secara berkelanjutan, sekaligus menjadi model kolaborasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Tantangan dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan di Negeri Hukurila

Pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan di Negeri Hukurila menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun potensi wisata bahari sangat besar, realisasi dari potensi tersebut memerlukan dukungan dari banyak faktor, seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pasar yang luas, serta perlindungan terhadap lingkungan. Sayangnya, keterbatasan dalam aspek-aspek ini sering kali menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Hukurila.

Salah satu tantangan mendasar dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Hukurila adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal manajemen usaha, pemasaran digital, dan penguasaan bahasa asing. Banyak pelaku usaha lokal memiliki keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi mereka belum terampil dalam mengelola bisnis secara modern. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kecil masih bersifat informal, tanpa pencatatan keuangan yang memadai atau strategi pemasaran yang jelas.

Dalam wawancara dengan Pak DU, seorang pelaku usaha yang mengelola penyewaan perahu wisata, ia mengungkapkan bahwa mereka bisa melayani wisatawan lokal dengan baik. Namun, ketika wisatawan asing datang, mereka sering kesulitan dalam berkomunikasi. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pemasaran online masih menjadi tantangan besar bagi mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM yang terbatas berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dan memperluas pasar mereka. Tanpa adanya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, potensi pengembangan usaha akan sulit tercapai. Selain keterbatasan SDM, akses pasar yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan di Hukurila. Banyak produk lokal,

seperti kerajinan dari limbah laut dan makanan olahan khas, masih sulit dipasarkan di luar wilayah Ambon. Pelaku usaha mengandalkan penjualan langsung kepada wisatawan yang datang ke Hukurila, sehingga ketika kunjungan wisatawan menurun, pendapatan mereka juga ikut merosot. Ibu NR, yang memproduksi kerajinan dari limbah kerang, berbagi pengalamannya bahwa mereka ingin produk ini dikenal lebih luas. Namun, ia mengungkapkan bahwa mereka terkendala oleh biaya pengiriman yang mahal dan kesulitan dalam mencari mitra pemasaran di luar daerah. Ketergantungan pada wisatawan yang datang secara fisik menjadi risiko besar bagi keberlanjutan usaha. Terlebih lagi, selama masa pandemi, jumlah wisatawan menurun drastis, dan banyak pelaku usaha di Hukurila yang terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu.

Tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah ancaman kerusakan lingkungan, terutama di kawasan pesisir dan terumbu karang yang menjadi daya tarik utama wisata bahari. Aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran pantai, kerusakan ekosistem bawah laut akibat praktik snorkeling dan diving yang tidak ramah lingkungan, serta overfishing yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Dalam wawancara dengan Bapak RDW, seorang pemandu wisata lokal, ia menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kerusakan terumbu karang di salah satu spot snorkeling akibat banyaknya wisatawan yang tidak tahu aturan. Namun, ia bersyukur karena sekarang ada program edukasi dari pemerintah yang mengajarkan cara menjaga ekosistem laut. Observasi lapangan mengonfirmasi adanya beberapa lokasi di pesisir Hukurila yang mengalami degradasi lingkungan. Sampah plastik yang terbawa arus juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut di sekitar Negeri Hukurila.

Tantangan-tantangan ini dapat dianalisis melalui konsep ekosistem kewirausahaan, yang menekankan pentingnya lingkungan pendukung bagi perkembangan kewirausahaan. Dalam sebuah ekosistem yang sehat, terdapat berbagai elemen yang saling melengkapi dan memperkuat, seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, jejaring sosial yang kuat, serta akses terhadap pengetahuan dan sumber daya keuangan. Namun, di Hukurila, elemen-elemen ini belum sepenuhnya terintegrasi. Misalnya, regulasi pemerintah sudah mendukung pengembangan usaha lokal, tetapi infrastruktur seperti akses jalan dan jaringan internet masih belum optimal. Jejaring sosial antar-pelaku usaha juga masih terbatas, sehingga potensi kolaborasi dan berbagi pengetahuan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik, di mana pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat lokal bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Inisiatif pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, serta penguatan jejaring pemasaran dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, pendekatan pariwisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism*) yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Melalui kolaborasi yang sinergis, tantangan-tantangan ini dapat diubah menjadi

peluang bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Negeri Hukurila.

Model Kolaborasi Adaptif-Partisipatif dalam Pengembangan Pariwisata Bahari

Dalam konteks pengembangan pariwisata bahari di Negeri Hukurila, model kolaborasi yang terbentuk menunjukkan karakteristik yang unik dan berbeda dari model kolaborasi tradisional. Alih-alih bersifat top-down, kolaborasi di Hukurila lebih adaptif dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan pariwisata. Model ini lahir dari kebutuhan untuk merespons dinamika lokal yang terus berubah, baik dari segi tantangan lingkungan, permintaan wisatawan, hingga kapasitas sumber daya yang tersedia.

Model kolaborasi adaptif-partisipatif yang berkembang di Hukurila menekankan pada proses komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan secara kolektif, serta fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi lokal. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, memiliki ruang untuk berkontribusi dan menyampaikan pendapat mereka. Observasi lapangan menunjukkan bahwa forum-forum diskusi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sering diadakan untuk membahas perencanaan wisata. Misalnya, dalam penentuan jalur wisata snorkeling yang ramah lingkungan, keputusan tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan nelayan lokal dan pemandu wisata. Pak HMN, seorang nelayan yang aktif dalam forum tersebut, menyatakan bahwa mereka diajak bicara langsung tentang rencana wisata di daerah tersebut. Pemerintah meminta masukan dari mereka, terutama mengenai lokasi yang aman dan tidak mengganggu wilayah tangkapan ikan. al ini menunjukkan bagaimana model kolaborasi ini berbeda dari pendekatan tradisional yang biasanya didominasi oleh keputusan pemerintah tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal.

Salah satu contoh konkret dari model kolaborasi ini adalah program rehabilitasi terumbu karang di Pantai Hukurila. Program ini dimulai sebagai inisiatif pemerintah kota, tetapi dengan cepat berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat setempat, kelompok nelayan, komunitas penyelam lokal, serta pelaku usaha pariwisata. Dalam program ini, masyarakat dilatih untuk menanam dan merawat terumbu karang buatan, sementara pelaku usaha menyediakan peralatan dan logistik yang diperlukan. Pola komunikasi yang diterapkan sangat adaptif, di mana setiap keputusan strategis selalu melalui diskusi terbuka. Ibu RN, anggota komunitas wanita penggerak wisata di Hukurila, menjelaskan bahwa awalnya mereka hanya membantu dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Namun, seiring waktu, mereka diajak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi terumbu karang. Ia menyatakan bahwa hal ini membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan yang tertarik dengan kegiatan ekowisata berbasis lingkungan, serta pulihnya sebagian ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak.

Meskipun model kolaborasi ini menunjukkan potensi besar, tantangan tetap ada, terutama dalam koordinasi dan pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan

masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadi ketidakseimbangan peran di mana pemerintah cenderung mendominasi dalam pengambilan keputusan teknis, sementara masyarakat hanya dilibatkan pada tahap implementasi. Namun, pola kolaborasi yang lebih adaptif dan partisipatif berhasil memperbaiki kondisi ini dengan menetapkan mekanisme kerja yang jelas. Setiap pihak memiliki tanggung jawab spesifik—pemerintah sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber daya, masyarakat sebagai pelaksana dan penjaga nilai-nilai lokal, serta pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk wisata.

Model kolaborasi adaptif-partisipatif di Hukurila dapat dijelaskan melalui konsep inovasi sosial dan pembangunan inklusif. Inovasi sosial terjadi ketika masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini mendorong munculnya ide-ide baru yang relevan dengan konteks lokal, seperti pengembangan paket wisata edukasi berbasis konservasi atau pelatihan pemandu wisata berbasis budaya lokal.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari berkelanjutan di Negeri Hukurila tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknokratis untuk pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai proses sosial yang bersifat adaptif dan partisipatif, yang memungkinkan terjadinya sinergi antara kebijakan publik dan prakarsa warga berbasis kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memahami peran dan sinergi kedua aktor tersebut terjawab melalui temuan bahwa pemerintah berperan strategis sebagai fasilitator kebijakan, penyedia pelatihan dan infrastruktur, sementara masyarakat tampil sebagai aktor utama dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha pariwisata yang memanfaatkan potensi lokal secara lestari. Dalam konteks ini, kolaborasi yang terjalin bukan hanya bersifat formal, tetapi juga dibangun di atas relasi kepercayaan dan kepedulian bersama terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dari studi ini terletak pada pemetaan model kolaborasi yang responsif terhadap dinamika lokal, yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lain sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan kewirausahaan pariwisata yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekosistem kewirausahaan pariwisata tidak hanya bergantung pada dukungan struktural dari negara, tetapi juga pada kapasitas masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian jangka panjang.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan

eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, D. Y. (2019). Kajian Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku Tengah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(01).

Astutik, J., & Ramadhoan, R. I. (2020). Shared Identity as Social Capital in The Chinese-Javanese Relations in Malang City, Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, *3*(3), 231–243. https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.03.224

Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, *8*(1), 47–58. https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292

Badaruddin, E., Sahusilawane, J. F., & Anidlah, J. (2021). Konservasi Tradisional terhadap Sumberdaya Alam di Kecamatan Leitimur Selatan. *MAKILA*, *15*(1), 22–36. https://doi.org/10.30598/makila.v15i1.3270

Botanri, A. A. A., Makatita, R., & Sopacua, V. (2021). Rencana Sarana Pengolahan Limbah B3 Covid-19 di Kota Ambon. *Jurnal Tata Loka Universitas Diponegoro*, *23*(1), 151–158. https://doi.org/10.14710/tataloka.23.1.151-158

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.

Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, *7*(4), 1–27.

Gregorius Sri Wuryanto, & Eka Adhi Wibowo. (2021). Konflik dan Negosiasi Ruang Sosial pada Pemodelan Masterplan Desa Wisata. *Sendimas 2021 - Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 379–394. https://doi.org/10.21460/sendimasvi2021.v6i1.73

Jentoft, N., & Olsen, T. S. (2019). Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a 'slow' interview technique enriches data. *Qualitative Social Work*, *18*(2), 179–193. https://doi.org/10.1177/1473325017712581

Lamerkabel, J. S. A., Siahaya, V. G., Saepuloh, W., Lastriyanto, A., Junus, M., Erwan, E., Batoro, J., Jaya, F., & Masyithoh, D. (2021). Karakteristik Morfologi dan Morfometrik Lebah Madu Tak Bersengat (Apidae; Melliponinae) pada Koloni di Daerah Pesisir Pulau Ambon. *Jurnal Budidaya Pertanian*, *17*(1), 28–35. https://doi.org/10.30598/jbdp.2021.17.1.28

Latuheru, R., & Tiwery, C. (2022). PKMS Pelatihan Tanaman Hidroponik Bagi Ibu-Ibu PKK Negeri Ema. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(2), 143–152. https://doi.org/10.69765/mjppm.v1i2.513

Lee, T. H., & Jan, F.-H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, *70*, 368–380. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003

Lelloltery, H., Hitipeuw, J. C., & Sahureka, M. (2020). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Hutan Tropis*, *8*(1), 23. https://doi.org/10.20527/jht.v8i1.8155

Nendissa, R. H., Matitaputty, M. I., & Lainsamputty, N. (2021). Cuci Negeri Sebagai Kearifan Lokal Dalam Penanganan Covid 19 di Kota Ambon. *Bacarita Law Journal*, *1*(2), 98–110. https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3617

Niode, I. Y., & Rahman, E. (2022). Desain Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Bahari dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *28*(3), 332–348. https://doi.org/10.22146/jkn.77943

Pical, V. J., & Lopulalan, D. L. Y. (2022). Gender dan Ketahanan Pangan pada Masyarakat Pesisir Kota Ambon. *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology*, 1–7. https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL.1-7

Rahma, N. H. A. (2020). *Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan*. STP AMPTA Yogyakarta.

Rumkel, M., Nanlohy, H., & Saiful, S. (2022). Strategi Peningkatan Usaha Rumah Tangga Perikanan Hand Line di Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)*, *6*(1), 47–56. https://doi.org/10.30598/papalele.2022.6.1.47

Sawatsuk, B., Darmawijaya, I. G., Ratchusanti, S., & Phaokrueng, A. (2018). Factors Determining the Sustainable Success of Community-Based Tourism: Evidence of Good Corporate Governance of Mae Kam Pong Homestay, Thailand. *International Journal of Business and Economic Affairs*, *3*(1). https://doi.org/10.24088/IJBEA-2018-31002

Suastika, I. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata. *SISTA: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, *1*(1), 41–51.

Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(4), 565. https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p10

Sunarimahingsih, Y. T., Dewi, Y. T. N., Susanti, B. T., NURHAYATI, B. R., & Nugroho, A. W. (2021). *Konservasi Benda Budaya Simbol Adat Sebagai Penguatan Eksistensi Negeri Dalam Pembangunan Paska Konflik Di Ambon"*.

Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. (2019). Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation. *Sustainability*, *11*(9), 2506. https://doi.org/10.3390/su11092506

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(1), 1–23. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219

Zielinski, S., Kim, S., Botero, C., & Yanes, A. (2020). Factors that facilitate and inhibit community-based tourism initiatives in developing countries. *Current Issues in Tourism*, *23*(6), 723–739. https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1543254